



Pungli Rawan Terjadi Saat Penerimaan Siswa

Orangtua Mengadu karena Dimintai Uang Gedung

BANTUL, KOMPAS – Menjelang masa penerimaan peserta didik baru, pungutan liar di sekolah makin rawan terjadi. Pungutan liar ini umumnya berbentuk uang titipan atau uang gedung yang dibebankan di awal pendaftaran.

Sekretaris Jenderal Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan Sarang Lidi, Yuliani Putri mengatakan, pungutan liar (pungli) paling rawan terjadi di sekolah dasar, terutama di sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat.

"Sekolah seperti itu biasanya diserbu pendaftar sehingga persaingan untuk masuk semakin ketat. Pungli biasanya digunakan agar dapat lolos persaingan itu dengan lebih mudah," tutur Yuliani, di Kabupaten Bantul, Jumat (15/5).

Menurut Yuliani, penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SLTP dan SLTA relatif lebih tertib dengan adanya pendaftaran

online. Dengan sistem ini, proses pendaftaran menjadi transparan dan lebih mudah diawasi.

Yuliani mengungkapkan saat ini sejumlah SD negeri di DIY diduga sudah membuka penitipan untuk PPDB tahun ajaran 2009/2010 sejak sekitar sebulan lalu. Padahal, secara resmi PPDB tahun ajaran 2009/2010 tingkat SD baru boleh dilakukan pada awal Juli.

Praktik penitipan yang disertai pungutan ini diketahui dari laporan sejumlah wali murid yang mengadu ke Sarang Lidi. Mereka umumnya dimintai uang gedung antara Rp 500.000-Rp 1 juta.

Gratis

Selain mendahului waktu resmi yang telah ditentukan, lanjut Yuliani, penitipan yang disertai pungutan ini juga melanggar aturan mengenai sekolah gratis. "Sejak diberlakukannya sekolah gratis tahun 2009 ini, pungutan uang gedung sudah sama sekali tidak diperbolehkan," tutur Yuliani.

Menurut dia, pungli yang masih dipraktikkan sekolah ini menambah beban masyarakat karena membuat biaya sekolah semakin mahal.

Menurut Ketua I Sarang Lidi Dwi Maryono, praktik pungli melalui penitipan dan uang gedung ini telah berulang kali terjadi. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Lemahnya penertiban terhadap pungli di sekolah diduga karena sistem pengawasan yang tidak memadai. "Peraturan-peraturan

sebenarnya sudah bagus membatasi pungli, tetapi tidak ada sistem pengawasan sehingga masih saja terjadi," ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengakui masa PPDB merupakan saat yang rawan pungutan dan penyelewengan aturan. Untuk mencegahnya, proses PPDB di sekolah akan diawasi oleh petugas pengawas yang diturunkan dinas. "Para petugas itu akan keliling dari satu sekolah ke sekolah lainnya untuk mengawasi jalannya PPDB," tuturnya.

Salah satu tugas pengawas adalah memerhatikan nama anak didik yang diterima adalah anak yang mendaftar pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, diharapkan praktik penitipan dapat terdeteksi. Sekolah yang terbukti melakukan penyelewengan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. (IRE)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005